BERKOMITMEN CEGAH MALADMINISTRASI DESA, ABDUL HADI TERIMA PENGHARGAAN DARI OMBUDSMAN RI

Senin, 14 April 2025 - kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN- Gelaran puncak Hari Jadi ke-22 Kabupaten Balangan yang digelar di Halaman Kantor Bupati Balangan, Sabtu (12/4/2025) kemarin sekaligus menjadi momentum Ombudsman Republik Indonesia untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Kabupaten Balangan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Balangan, H Abdul Hadi menerima piagam penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mencegah maladministrasi desa.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, kepada Bupati Balangan, H Abdul Hadi. Diketahui, piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan oleh Ombudsman RI atas upaya serius yang dilakukan Bupati Balangan dalam membina dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa-desa.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 10 desa di Balangan ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi oleh Ombudsman RI. Desa-desa tersebut adalah Desa Kupang, Desa Banua Hanyar, Desa Padang Raya, Desa Baruh Panyambaran, Desa Hamarung, Desa Muara Jaya, Desa Mayanau, Desa Sungai Ketapi, Desa Inan, dan Desa Maradap.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AP2KBPMD) Balangan, H Bejo Priyogo, mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, agar seluruh masyarakat Balangan dapat merasakan pelayanan yang adil dan merata.

Hal tersebut ujar Bejo sebagai bentuk dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan dalam membangun desa dan menata kota menuju Kabupaten Balangan yang lebih sejahtera. Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Balangan untuk terus memperkuat pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bejo pun berharap, desa-desa yang telah mendapatkan predikat Anti Maladministrasi dapat menjadi panutan bagi desa lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.(aol)